FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline	Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis (SS 1)	Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (Ultimate Goal)					
Indikator Kinerja (IK 1)	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%	85%	90%	95%	100%
Indikator Kinerja (IK 1.1)	Indeks Demokrasi Indonesia	75.30	75.35	75.40	75.45	75.50
Indikator Kinerja (IK 1.2)	Indeks Citra Indonesia di mata Dunia Internasional	3.8	3.836	3.882	3.942	4
Indikator Kinerja (IK 1.3)	Indeks Pembangunan Hukum	0.65	0.67	0.69	0.71	0.73
Indikator Kinerja (IK 1.4)	Indeks Perilaku Anti Korupsi	4	4.03	4.06	4.09	4.14
Indikator Kinerja (IK 1.5)	Terpenuhinya Kekuatan Pokok Minimum Essential Force (MEF)	72%	79%	86%	93%	100%
Indikator Kinerja (IK 1.6)	Tingkat Kriminalitas	129 Orang/10 0.000 penduduk	112 Orang/10 0.000 penduduk	112 Orang/10 0.000 penduduk	111 Orang/10 0.000 penduduk	111 Orang/10 0.000 penduduk
Indikator Kinerja (IK 1.7)	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73.87	73.99	74.45	75.8	75.8
Indikator Kinerja (IK 1.8)	Skor Global Cyber Security Index	0.792	0.792	0.826	0.826	0.838

Indikator Kinerja (IK 1.9)	Instansi Pemerintah dengan indeks RB Baik keatas	70	75	80	85	85
Sasaran Strategis (SS 2)	Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik					
Indikator Kinerja (IK 2.1)	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam	78	78.2	78.4	78.6	78.8
Indikator Kinerja (IK 2.2)	Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	73	73.2	73.4	73.6	73.8
Indikator Kinerja (IK 2.3)	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Jakarta, Februari 2020

Menko Polhukam

MOH. MAHFUD MD

FORMULIR MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA	
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	
Definisi SS 1	Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukhankam serta melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam pelayanan publik
Definisi Indikator Kinerja (IK 1)	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional adalah upaya Kemenko Polhukam mendorong capaian kinerja pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam dalam rangka mendukung pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan serta pelayanan publik
Definisi Indikator Kinerja (IK 1.1)	Indeks Demokrasi Indonesia merupakan Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Sumber Data (IK 1.1)	Badan Pusat statistik (BPS)
Definisi Indikator Kinerja (IK 1.2)	Indeks Citra Indonesia dimata dunia internasional adalah persepsi yang dipercayai/diyakini stakeholder eksternal terhadap Indonesia yang didasarkan kepada kemampuan yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan Internasional yang terbangun berdasarkan power yang dimiliki baik yang bersifat hard maupun soft.
Sumber Data (IK 1.2)	Kementerian Luar Negeri
Definisi Indikator Kinerja (IK 1.3)	Indeks Pembangunan Hukum merupakan indeks untuk mengukur intervensi program dan kegiatan/capaian kebijakan pemerintah pada kementerian/lembaga bidang hukum, yang direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen perencanaan Nasional berdasarkan sasaran strategis dan arah kebijakan bidang hukum RPJMN 2020-2024, dimana sasaran strategis ditetapkan menjasi aspek dan arah kebijakan ditetapkan menjadi variabel.
Sumber Data (IK 1.3)	Badan Pusat Statistik (BPS)
Definisi Indikator Kinerja (IK 1.4)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah metode pengukuran tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 (kecuali tahun 2016).
Sumber Data (IK 1.4)	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Definisi Indikator Kinerja (IK 1.5)	Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi.

Sumber Data (IK 1.5)	Kementerian Pertahanan
Definisi Indikator Kinerja (IK 1.6)	Tingkat kriminalitas merupakan indikator yang dapat representasi tingkat keamanan di Indonesia diukur melalui kuantitas kelompok atau komunitas yang melakukan pelanggaran hukum hukum atau pelanggaran pidana, sehingga memengaruhi keseimbangan sosial dalam masyarakat.
Sumber Data (IK 1.6)	Polri
Definisi Indikator Kinerja (IK 1.7)	Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan indeks yang mengukur keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan beribadah masing-masing dalam suatu daerah.
Sumber Data (IK 1.7)	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Definisi Indikator Kinerja (IK 1.8)	Global Cyber Security Index (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara anggota International Telecommunication Union (ITU) terhadap peningkatan kesadaran cybersecurity. GCI membahas seputar Global Cybersecurity Agenda dari ITU dengan 5 (lima) pilar yaitu: a. Legal (hukum) b. Technical (teknis) c. Organizational (organisasi) d. Capacity Building (pengembangan kapasitas) e. Cooperation (kerja sama)
Sumber Data (IK 1.8)	International Telecommunication Union (ITU)
Definisi Indikator Kinerja (IK 1.9)	Indeks RB merupakan indeks yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur Tata Kelola instansi pemerintah yang diukur melalui 8 area perubahan Reformasi Birokrasi.
Sumber Data (IK 1.9)	Kementerian PAN RB
Cara Menghitung (IK 1.9)	$\sum$ = (Jumlah capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik) dibagi (Target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada dokumen perencanaan nasional) x 100%
Definisi SS 2	Tata kelola Kemenko Polhukam yang baik adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi menuju kearah yang lebih baik
Definisi Indikator Kinerja (IK 2.1)	Penilaian Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB sesuai Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Terdapat 8 area perubahan yang menjadi penilaian dalam Reformasi Birokrasi yaitu Area Manajemen Perubahan, area penataan dan penguatan organisasi, area penataan peraturan perundang-undangan, area penataan sumber daya manusia, area penataan tata laksana, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas kerja, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber Data (IK 2.1)	Kemenpan RB
Cara Menghitung (2.1)	Lembar Kerja Evaluasi Tim Penilai Kemenpan RB
Definisi Indikator Kinerja (IK 2.2)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen dalam penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kemenko Polhukam yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
Sumber Data (IK 2.2)	Kemenpan RB
Cara Menghitung (IK 2.2)	Penilaian berasal dari Tim Penilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenpan RB dengan kategori penilaian sebagai berikut: 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)
Definisi Indikator Kinerja (IK 2.3)	Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah. 4 (empat) opini BPK, yaitu : WTP, WDP, adversed, dan disclaimer.
Sumber Data (IK 2.3)	laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI
Cara Menghitung (IK 2.3)	penilaian yang berasal dari BPK RI atas Laporan Keuangan

Jakarta, Februari 2020

Menko Polhukam

MOH. MAHFUD MD